

Kekerasan Terhadap Golongan Tionghoa pada Masa Revolusi di Malang, 1945–1949

GEZA SURYA PRATIWI

Arsip Nasional Republik Indonesia
Email: gezasurya@gmail.com

Abstract

This article discusses mass-violence during the revolutionary period directed to the Chinese, who were considered to have received economic and political benefits during the colonial period. It aims to examine the roots of violence perpetrated against the Chinese since the Dutch colonial period in the city of Malang. To do so, this study uses primary sources such as archives, newspapers and photographs that were produced during the revolutionary period. In addition, this study also collected oral history through interviews with the survivors and other related parties. Based on the conducted research, it was found out that the violence against the Chinese during the revolution period in Malang occurred as a result of the accumulation of anger among the local population over the injustice policy of the colonial government benefitting the Chinese economically as well as politically.

Keywords:

Chinese;
Malang;
revolution
era; violence

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kekerasan pada masa revolusi yang menasar pada golongan Tionghoa di Kota Malang, karena dianggap menerima keuntungan secara ekonomi dan politis pada masa kolonial. Artikel ini bertujuan untuk melihat akar kekerasan yang terjadi terhadap golongan Tionghoa sejak masa kolonialisme Belanda di Kota Malang. Untuk itu, artikel ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber primer adalah berupa arsip dan dokumen dari masa revolusi, koran-koran dan arsip foto sezaman. Selain itu, digunakan pula informasi dan kesaksian lisan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kekerasan terhadap golongan Tionghoa pada masa revolusi di Malang terjadi akibat akumulasi kemarahan penduduk Bumiputra atas ketidakadilan selama masa kolonial, saat golongan Tionghoa mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik.

Kata Kunci:

kekerasan;
Malang;
revolusi;
Tionghoa

Pengantar

"Indonesia is a violent country". Sebuah pernyataan yang cukup keras dari dua ahli Indonesia, Freek Colombijn dan Thomas Lindblad dalam kata pengantar untuk buku mereka yang berjudul, "Roots of Violence in Indonesia". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup akrab dengan beragam praktik kekerasan. Kedua penulis tersebut berpendapat bahwa beragam praktik kekerasan tersebut mempunyai sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian intrinsik dalam mentalitas kolektif bangsa Indonesia. Beberapa poin penting dari apa yang dipaparkan oleh Colombijn dan Lindblad terkait budaya kekerasan yang berkembang di Indonesia tersebut di antaranya adalah bahwa korban-korban dari praktik kekerasan tersebut biasanya adalah orang yang berada di luar lingkaran satu kelompok (*outsiders*) dan mereka ini biasanya mengalami praktik dehumanisasi (Colombijn and Lindblad, 2002: 1-23).

Kekerasan yang terjadi di Indonesia biasanya terjadi pada masa-masa transisi kekuasaan. Hal ini disebabkan karena pada saat timbulnya kegentingan, aparat pemerintah menjadi lemah untuk menguasai atau mengendalikan situasi. Oleh karena itu, kekerasan dan teror akan menjadi alat bagi kelompok atau organisasi tertentu untuk menjalankan agenda kepentingan atau kekuasaannya. Salah satu contoh dari masa transisi dalam sejarah Indonesia yang identik dengan kekerasan adalah masa setelah runtuhnya kekuasaan Jepang dan datangnya kemerdekaan bagi Indonesia, yakni periode revolusi kemerdekaan. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa kekerasan merupakan modal yang berharga dalam perjuangan revolusioner. Dalam suasana krisis politik, ketegangan-ketegangan terjadi karena para pemimpin kelompok atau organisasi tertentu menggunakan kekerasan untuk mendominasi situasi (Kartodirdjo, 1981: 9).

Pada masa yang disebut revolusi ini, semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia berkobar di kalangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya dari Pihak Belanda yang berusaha berkuasa kembali setelah kekalahan mereka dari Jepang pada tahun 1942. Semangat revolusi tersebut tidak hanya berkembang di ranah nasional saja, akan tetapi juga menyebar ke daerah-daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah ini menunjukkan perbedaan dalam merespon revolusi nasional, dan beberapa di antaranya muncul sebagai bentuk revolusi sosial di tingkat daerah. Beberapa contoh terjadinya revolusi di tingkat daerah ini adalah Aceh, Sumatera Utara, Banten dan juga sekitar Pekalongan yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa Tiga Daerah" (*Prisma* No. 8, 1981: 2).

Kekerasan terhadap golongan minoritas juga banyak ditemukan pada masa revolusi. Salah satu golongan minoritas yang menjadi korban dari kekerasan ini adalah golongan Tionghoa. Fenomena anti-Tionghoa memang

sudah banyak tercatat dalam sejarah panjang Indonesia jauh sebelum masa revolusi. Beberapa sejarawan menganggap bahwa pembunuhan sekitar 10.000 etnis Cina di Batavia pada 1740 merupakan awal dari aksi kekerasan yang berkelanjutan terhadap golongan ini. Sementara itu, pada masa revolusi sendiri, salah satu kekerasan massal terhadap golongan Tionghoa terjadi di daerah Tangerang. Dalam penelitiannya, Ravando mengungkapkan bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi pada Mei 1946 tersebut mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1085 jiwa (Lie, 2014: 76). Aksi-aksi kekerasan terhadap golongan Tionghoa itu pada umumnya dilandasi berbagai alasan seperti agama, kesukuan hingga nasionalisme (Heidhues, 2012: 383). Beberapa sejarawan berpendapat bahwa golongan-golongan minoritas seperti Tionghoa menjadi korban pada masa revolusi karena mereka dianggap telah mendapat keuntungan secara ekonomi pada masa kolonial (Kahin, 1985: 12).

Pada masa revolusi golongan Tionghoa memang dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu harus memilih untuk berada dalam pihak Belanda atau Republik Indonesia. Secara umum, alasan yang mereka pilih pada dasarnya dilandasi oleh alasan keamanan, untuk mendapatkan proteksi. Apakah mereka memilih untuk berada di pihak Republik atau meminta perlindungan terhadap Belanda, mempengaruhi citra mereka di kalangan penduduk Indonesia pada waktu itu. Oleh karena itulah, untuk melindungi kelompok mereka sendiri, golongan Tionghoa membentuk Pao An Tui, sebuah organisasi milisi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan diri mereka dari serangan musuh (Coppel, 1983: 26).

Komunitas Tionghoa Malang Sebelum Perang

Malang adalah sebuah kota pegunungan yang terletak sekitar 65 kilometer di selatan Surabaya. Jumlah populasi penduduk Eropa dan Tionghoa cukup tinggi, karena mereka menyukai iklim yang sejuk dari kota ini (Bussemaker, 2005: 266). Sejak sebelum tahun 1900 kota Malang tercatat telah memiliki penduduk yang beragam, yakni kelompok pribumi, penduduk timur asing dan penduduk Belanda. Pada tahun 1940 jumlah penduduk Eropa sebanyak 13.867 dan penduduk Tionghoa sebanyak 12.233 dari total penduduk Malang sebanyak 169.316 (*Volkstelling 1930 Deel VII: Chinezen en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch Indie*, 1930: 262-263). Penduduk-penduduk ini kemudian dikelompokkan berdasarkan etnis, dengan pola pemukiman mengelilingi alun-alun kota yang dianggap sebagai *civic center* atau pusat sipil. Orang Belanda tinggal di dekat pusat-pusat pemerintahan dan jalan-jalan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Mereka tinggal di sebelah barat daya dari alun-alun yakni daerah *Taloon, Tongan, Sawahan, Rampal, Klodjenlor, Tjelaket, Oro – Oro Dowo, Kajoetangan* dan sekitarnya. Orang-orang Tionghoa yang sebagian besar merupakan pedagang, tinggal di sebelah tenggara alun-alun. Daerah tersebut dekat dengan Pasar Besar yang kemudian disebut

pecinan. Sementara itu, penduduk-penduduk pribumi tinggal di gang-gang kecil di sebelah selatan alon – alon (Handinoto, 1996: 21).

Malang mulai berkembang menjadi kotamadya kedua terbesar di Jawa Timur sejak ditetapkan menjadi kotapraja pada tahun 1914. Bahkan, Handinoto sempat menyebut bahwa perencanaan perkembangan Kota Malang merupakan salah satu rencana pengembangan kota yang terbaik di Hindia Belanda. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran walikota Malang yang pertama yakni H. I. Bussemaker dan insinyur perencana kota yang terkenal waktu itu, yaitu Thomas Karsten (Handinoto, 1996: 21).

Komunitas Tionghoa Malang terdiri atas kelompok Tionghoa peranakan dan Tionghoa Totok. Istilah Tionghoa peranakan digunakan untuk menyebut mereka yang dilahirkan di Hindia Belanda, sedangkan Tionghoa totok adalah mereka yang dilahirkan di Cina daratan. Pada tahun 1930 penduduk Tionghoa peranakan tercatat sebesar 5.553, terdiri dari 2.873 laki-laki dan 2.680 perempuan. Berdasarkan kelompok umurnya, kelompok umur 0-14 tahun merupakan yang paling, yakni sebesar 2.073. Sementara itu, kelompok Tionghoa totok tercatat berjumlah 2.263 jiwa, yang terdiri atas 1.741 laki – laki dan 522 perempuan. Berbeda dengan golongan peranakan, golongan totok didominasi oleh kelompok umur 20 – 49 tahun yang menunjukkan angka 1.286 (*Volkstelling 1930 Deel VII: Chinezen en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch Indie*, 1930: 262-263).

Sementara itu, dari sisi kelompok suku orang Tionghoa di Malang didominasi oleh kelompok Hokkian, yaitu sebesar 4.292 orang. Jumlah ini disusul oleh kelompok Kwong Foe sebesar 670 orang dan kelompok Hakka sebesar 103 orang. Jumlah paling sedikit ialah kelompok Tio Tjoe, yaitu sebesar 23 orang. Selain itu, tercatat 699 orang lainnya berasal dari tanah Cina daratan lainnya dan 3 orang berasal dari tanah non Cina. Ditambah lagi 63 orang lain yang tercatat tidak diketahui kelompoknya (*Volkstelling 1930 Deel VII: Chinezen en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch Indie*, 1930: 305).

Sejarah komunitas Tionghoa di Malang tidak dapat dilepaskan dari perkumpulan sosial kematian (*hong boen*) Ang Hien Hoo yang didirikan pada 1910. Perkumpulan ini menggunakan klenteng Eng An Kiong sebagai tempat berkumpul (Budianta, 2012: 257). Dalam bidang pendidikan, masyarakat Tionghoa juga mengambil peran di antaranya dengan mendirikan sekolah Tiong Hwa Hwee Koan untuk anak-anak Tionghoa. Perkumpulan Ang Hien Hoo hadir sebagai pemersatu heterogenitas Tionghoa Malang. Perkumpulan ini menjadi sarana bagi golongan Tionghoa dengan latar belakang cultural *totok* maupun *peranakan* untuk berkumpul dan bersama-sama dalam berkarya. Perkumpulan ini sering mengadakan pertunjukan budaya di antaranya pertunjukan wayang Tionghoa, tarian naga dan semacamnya.

Komunitas Tionghoa Malang di Bawah Penjajahan Jepang

Pecahnya Perang Dunia Ke-II secara langsung berdampak terhadap Hindia Belanda. Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya hingga kemudian datang untuk menguasai Hindia Belanda. Jepang pada akhirnya berhasil mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942 melalui tiga titik, yaitu Banten, Rembang dan Tuban. Dari Tuban, Jepang masuk ke Surabaya (Handinoto, 2015: 160). Upacara penyerahan kekuasaan dari Gubernur ke Angkatan Darat Jepang dilakukan pada 5 Maret 1942 di Sidoarjo. Kekuasaan Jepang membawa banyak perubahan dalam kehidupan orang Tionghoa di Jawa Timur. Jepang berusaha mengendalikan keadaan dan menata kota dengan model dan konsep baru buatan Jepang.

Jepang memasuki kota Malang pada 9 Maret 1942, dan pemerintahan Karesidenan Malang selanjutnya diserahkan dari Residen G. Schwencke kepada Mayor Jenderal Abe Koichi. Pendudukan Jepang secara langsung juga berdampak terhadap posisi komunitas Tionghoa di Malang. Mereka merespon kondisi dan perubahan tersebut dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut Siauw Giok Tjhan, golongan totok ingin menunjukkan rasa solidaritas dan patriotismenya terhadap penderitaan saudaranya di Tiongkok. Oleh karena itu, mereka tidak mau bekerjasama dengan Jepang. Sementara itu, sebagian dari golongan peranakan berpendapat bahwa lebih mudah membantu melawan gerakan fasisme Jepang di tanah Jawa daripada mengirim bantuan ke negeri Cina. Golongan peranakan juga tidak mengingkari adanya usaha beberapa orang untuk bekerja sama dengan Jepang jika memang terpaksa dan itu dilakukan untuk keselamatan diri sendiri (Handinoto, 2015: 163).

Pada masa Jepang banyak dilaporkan terjadinya kasus penimbunan barang yang seharusnya dijual ke masyarakat umum di kawasan Malang. Barang-barang tersebut di antaranya adalah beras dan bahan bakar. Berdasarkan catatan *Keizei Hooin* sejak tanggal 23 April hingga 8 Oktober 2602 telah terjadi 201 persidangan kasus penetapan harga di luar ketentuan pemerintah. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 142 kasus dilakukan oleh golongan Tionghoa, 53 kasus dilakukan oleh pedagang pribumi, 5 kasus dilakukan oleh golongan Arab dan 1 kasus dilakukan oleh golongan Belanda (Hudiyanto, 2007: 216-217). Sebagian besar dari penimbun yang dilaporkan itu adalah golongan Tionghoa. Beberapa informan dari golongan Indonesia menganggap bahwa para penimbun tidak ingin merasa kesusahan pada masa Jepang. Hal ini dikatakan karena sulit sekali mencari barang tertentu pada masa tersebut. Sementara itu, dalam kacamata orang Tionghoa, penimbunan dilakukan sebagai perlawanan kepada Pemerintah Jepang yang menyita secara paksa barang dagangan dari golongan Tionghoa dan kemudian menjualnya dengan harga lebih murah. Hal ini disalahartikan oleh penduduk pribumi sebagai upaya untuk menyelamatkan diri sendiri (Hudiyanto, 2007: 120).

Selain menimbun barang, golongan Tionghoa juga tercatat menaikkan harga barang terutama dalam masa kelangkaan. Hal ini dialami oleh seorang pedagang Lie Ing Liong dari Kebalen yang dijatuhi denda sebesar f400 karena terbukti menjual korek api di atas harga yang semestinya ditetapkan. Denda serupa juga dikenakan kepada Ko Kwek Jang di Kayutangan yang menjual dua ban sepeda dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya (Hudiyanto, 2007: 125).

Golongan Tionghoa di Malang juga mulai menempati rumah-rumah elite milik orang Eropa yang kosong karena ditinggalkan penghuninya, yang harus menjalani tahanan di kamp interniran Jepang. Golongan Tionghoa dianggap lebih mampu mengurus rumah-rumah besar tersebut yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup mahal. Namun, hal itu menimbulkan kecemburuan yang cukup besar di kalangan penduduk pribumi. Mereka menganggap bahwa keadaan akan segera berbalik dan posisi golongan Tionghoa yang berada di puncak kejayaan tersebut tidak akan bertahan lama (Budianta, 2012: 256). Anggapan tersebut, terbukti tidak lama berselang ketika tentara Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu pada awal Agustus 1945, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Kekerasan terhadap Golongan Tionghoa pada Masa Revolusi

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia berubah menjadi tidak menentu. Terjadi konflik bersenjata antara pihak Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dan pihak Republik Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya. Semangat mempertahankan kemerdekaan ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Di kota Malang sendiri semangat tersebut terbaca dengan jelas dari tulisan-tulisan atau grafiti di dinding-dinding banyak bangunan, seperti "Indonesia for Indonesian", "Freedom of the Glory of any Nation", dan sebagainya (Dukut, 2006: 154).

Secara umum, kondisi keamanan menghilang seiring masih lemahnya otoritas yang dimiliki baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintahan NICA Belanda. Kondisi ini memicu terjadinya gejolak sosial, terutama kriminalitas dan berbagai aksi kekerasan, khususnya kepada golongan minoritas Bentuk kekerasan yang dimaksud meliputi perampokan, penjarahan, penyiksaan, hingga pembunuhan secara kejam (*Prisma* no 8, 1981: 14).

Pada masa awal kemerdekaan ini tidak terlalu banyak pembunuhan yang dilaporkan di Malang, kecuali kerusuhan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan dan merembaknya apa yang disebut aksi-aksi gedor yang meresahkan. Bahkan pada bulan September 1945 orang-orang Indo, Eropa dan Tionghoa masih bebas bepergian menggunakan transportasi publik

(Siong, 2001: 23). Namun, kondisi mulai berubah ketika Tentara Inggris mulai menginjakkan kakinya di Surabaya dan pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Malang, sebagai kota yang berdekatan dengan Surabaya juga terkena dampaknya berupa gelombang pengungsi dari Surabaya yang memasuki kota ini.

Pada waktu ini tersiar rumor bahwa sejumlah orang Tionghoa direkrut Belanda untuk menjadi mata-mata pada Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Mereka inilah yang kemudian dipanggil “Andjing NICA”. Bung Tomo dalam pidato-pidatonya bahkan menganggap bahwa bangsa Tionghoa juga harus dilawan karena mereka adalah kolaborator Belanda dan menyerukan untuk memerangi siapapun yang tidak mendukung perjuangan Republik. Untuk meredam sentimen yang diberikan oleh Bung Tomo ini, dan untuk menunjukkan loyalitas mereka terhadap perjuangan Republik, Siaw Giok Bie dan Go Gien Tjwan membentuk Angkatan Muda Tionghoa (AMT). Mereka yang tergabung dalam organisasi ini turut membantu perjuangan dengan menggabungkan diri dalam BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) (Budianta, 2012: 258). Tak hanya tergabung ke dalam BPRI, mereka juga bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seorang saksi mata Tionghoa mengatakan bahwa ia mempunyai tiga orang Oom atau saudara laki-laki dari ibunya yang bergabung dalam front perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan (Chambali, wawancara, 2017). Go Gien Tjwan juga menegaskan bahwa musuh orang Indonesia bukanlah orang Tionghoa melainkan Belanda. Ia mengatakan bahwa etnis Tionghoa juga merupakan korban dari penjajahan Belanda (Setiono, 2008: 337).

Kemudian, pada akhir tahun 1946 kembali muncul sebuah rumor bahwa di Kota Malang dibentuk sebuah organisasi Tionghoa yang anti kemerdekaan Indonesia dan menamakan diri mereka Anti Indonesia Merdeka. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Peta (*Penak Toeroet* Amerika atau Enak ikut Amerika). Organisasi ini dipimpin oleh seorang bernama Kwee Djoen Siang yang tinggal di Jl. Jagalan Malang. Usaha yang dilakukannya adalah mencetak uang palsu dan menyelenggarakan pertunjukan sandiwara untuk melemahkan kekuatan Republik di mata rakyat melalui propaganda-propaganda¹. Walaupun organisasi ini tidak terlalu masif namun adanya organisasi ini telah berkontribusi terhadap menguatnya anggapan di kalangan masyarakat Malang bahwa orang-orang Tionghoa tidak mendukung perjuangan revolusioner Indonesia.

Merebaknya kabar bahwa Belanda ingin menguasai wilayah Republik lagi, membuat kondisi kota Malang semakin kacau. Kabar itu menjadi kenyataan, Tentara Belanda kemudian benar-benar sampai dan menguasai daerah-daerah di sekitar kota Malang, seperti Kendalpayak, Pakisaji, Lawang,

1) Arsip Dinas Sejarah Militer TNI AD, Arsip Intelijen Jawa Timur no 345

kota Batu, hingga Singosari.² Tentara Belanda mulai masuk kota Malang pada tanggal 31 Juli 1947 dari arah utara melalui Blimbing³. Kwee Thiam Tjing, seorang penulis Tionghoa yang dikenal dengan nama samaran Camboek Berdoeri, menggambarkan suasana kota Malang waktu sebagai masa-masa mencekam bagi golongan Tionghoa, terutama antara tanggal 21 – 31 Juli 1947 saat maraknya kekerasan massal terhadap komunitas Tionghoa (Berdoeri, 2004: 225).

Pertama-tama, dalam menghadapi invasi Belanda itu, para pejuang Republik melancarkan taktik bumi hangus. Taktik tersebut ternyata menjadi salah satu alasan yang disahkan untuk menjarah rumah-rumah dan pabrik-pabrik milik orang-orang Tionghoa yang paksa untuk meninggalkan kota (Harsono, 2015). Tidak hanya dijarah, sebagian rumah dan pabrik tersebut juga dibakar dengan alasan supaya tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Selanjutnya, kedatangan tentara Belanda kembali di kota Malang juga dijadikan alasan bagi tindakan spontanitas dari beberapa golongan kriminal untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan terhadap kelompok Tionghoa, yang dianggap mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun politis pada masa kolonial. Hal itu diperparah dengan tersiarnya kabar-kabar yang menyudutkan golongan Tionghoa bahwa mereka tidak mendukung perjuangan republik dan justru memihak Belanda. Selain aksi-aksi kekerasan spontanitas, terdapat pula aksi-aksi kekerasan yang digerakan oleh pemimpin-pemimpin populer yang datang dari kalangan rakyat (*Prisma* no 8, 1981: 7-9).

Menurut Kwee Thiam Tjing, gelombang kekerasan dan penjarahan terhadap golongan Tionghoa dilaporkan meningkat sejak tanggal 21 Juli 1947, sesaat setelah Tentara Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama. Pada hari itu, pihak berwenang Republik Indonesia dan penduduk sipil mulai mengosongkan kota. Pada hari berikutnya, terjadi penjarahan dan pembakaran serta berbagai perkelahian antara komunitas Tionghoa dengan laskar-laskar revolusi. Daerah Kajoetangan mengalami serangkaian aksi pembakaran dan penjarahan. Pada tanggal 24 Juli penduduk sipil dan pihak berwenang melanjutkan tugas mereka untuk mengosongkan kota. Residen Soenarko dan Letnal Kolonel Bambang Soepeno menyatakan penyesalannya karena telah meninggalkan golongan Tionghoa tanpa diberikan perlindungan. Selain itu, mereka juga meminta bantuan perwakilan dari Chung Hua Tsung Hui untuk membantu mengamankan nyawa dan properti orang-orang Tionghoa (Hui, 1947: 15).

Pada tanggal 30 Juli Residen Soenarko mengatakan bahwa Republik akan bertempur hingga titik darah penghabisan dan pada titik ini ia tidak dapat lagi menjamin keselamatan golongan Tionghoa. Kemudian pada

2) ANRI, Arsip Kementerian Dalam Negeri, 1945 – 1949, no 137

3) ANRI, Arsip Kementrian Dalam Negeri 1945 – 1949, no 37



Figur 1.
Kondisi pabrik pengawetan makanan di Gadang tempat dibakarnya mayat-mayat orang Tionghoa korban kekerasan.
Sumber:
<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/>;
diakses pada 10 April 2022 pukul 20.58 WIB

tanggal 31 Juli 1947, pembakaran dan penjarahan kembali terjadi di pusat kota oleh beberapa kelompok laskar perjuangan (Hui, 1947: 15). Kwee Thiam Tjing sendiri mencatat bahwa sekitar 30 orang Tionghoa dibawa oleh sekelompok pemuda yang bersenjata bambu runcing, klewang, granat tangan, senapan dan lain lain menuju ke luar kota. Mereka dibawa karena didakwa sebagai mata-mata musuh sebab mereka ditemukan membawa uang kertas NICA. Padahal sikap orang-orang Tionghoa tersebut sebenarnya sangat wajar dan dapat dipahami mengingat kondisi inflasi yang sedang terjadi. Pada tanggal 22 Maret 1947 tercatat nilai tukar ORI dengan Uang NICA adalah 5,45 berbanding 100. Untuk itulah beberapa orang Tionghoa lebih memilih menggunakan uang NICA dibandingkan uang ORI karena lebih menguntungkan. Sesudah dikumpulkan di gedung Tiong Hoa Ie Sia atau Balai Pengobatan Tionghoa mereka kemudian digiring ke sebuah pabrik di Mergosono dan Gadang.⁴ Keesokan harinya, orang-orang Tionghoa yang dibawa tersebut ditemukan telah menjadi mayat.

Menurut beberapa sumber, beberapa orang yang digiring tersebut ada yang berhasil melarikan diri atas bantuan salah seorang golongan terpelajar dari Indonesia. Chung Hua Tsung Hui melaporkan bahwa dari total 30 orang yang dibawa oleh kelompok tersebut, 26 di antaranya ditemukan telah menjadi mayat. Menurut *Algemeen Indisch Dagblad* (edisi 20 Agustus 1947), 21 dari mayat-mayat tersebut dikuburkan dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka diduga menjadi korban atas kekerasan sebelum akhirnya dibunuh dan dibakar dalam pabrik tersebut.

Lebih lanjut *Algemeen Indisch Dagblad* memberitakan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah pabrik pengawetan makanan, dan bahwa 21 orang

4) ANRI, Arsip Kepolisian Negara 1945 – 1947, tanggal 22 Maret 1947 no.331.

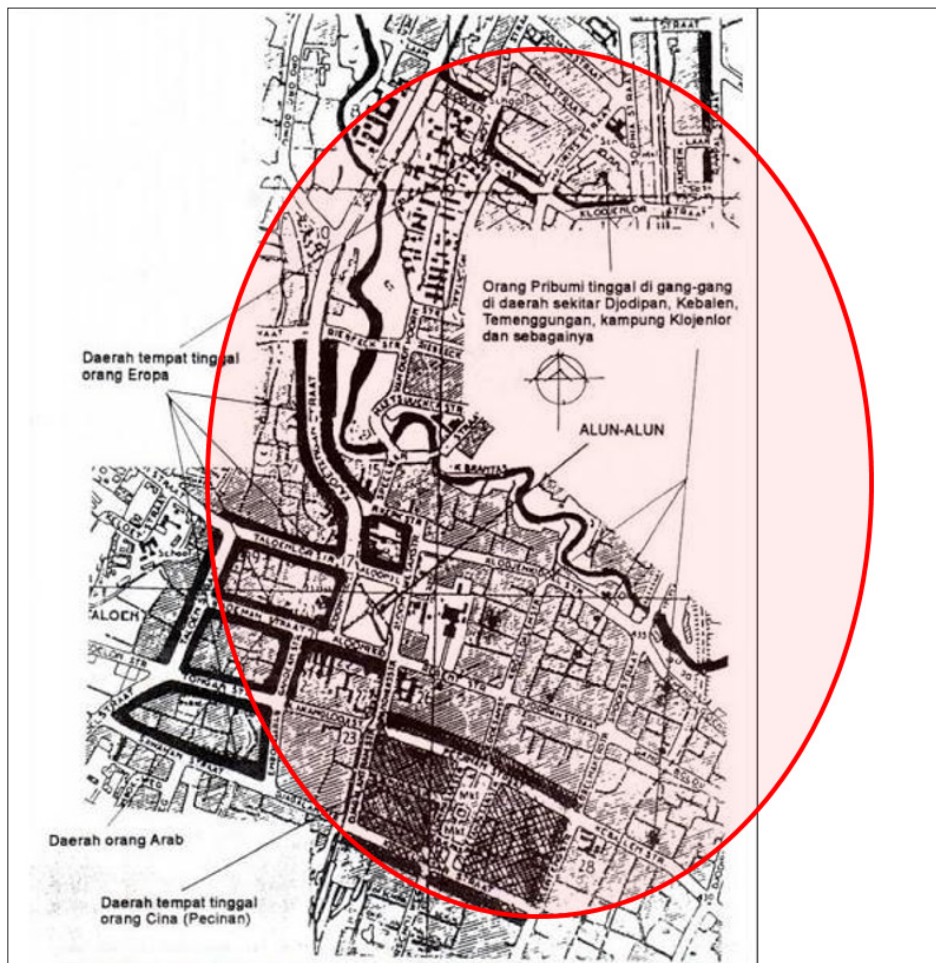
Tionghoa tersebut dibakar dalam secara bersamaan. Tindakan kejahatan yang mengerikan tersebut dilaporkan dipimpin oleh seorang bernama Lasmoe. Atas petunjuk dari penduduk ia akhirnya ditangkap, sehingga tidak dapat melarikan diri dari hukumannya. Kelompok tersebut bisa melakukan aksinya secara leluasa karena pada saat itu otoritas keamanan Republik dan pemerintahan Kota Malang tengah sibuk menghadapi Pasukan Belanda, yang telah berhasil menguasai sebagian dari wilayah kota Malang.

Kekerasan massal terhadap orang Tionghoa di Malang lainnya juga dilaporkan oleh surat kabar *De Gooi -en Eenlander*, edisi 7 Agustus 1947. Mengutip surat kabar Tionghoa “Keng Po”, *De Gooi-en Eenlander* melaporkan bahwa sebanyak 23 orang Tionghoa telah diculik dari daerah Kotalama, dan semuanya ditemukan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Selain itu, surat kabar yang sama juga melaporkan bahwa rumah dari menteri negara baru Republik, Thio Giok Tjan, di Kajoetangan telah dikosongkan dan isinya telah dijarah. Sementara itu, Koresponden dari *Algemeen Nieuws – Telegraaf Agentschaap* mengaku memiliki akses terhadap sejumlah foto otentik dari orang Cirebon yang menunjukkan orang-orang Tionghoa dewasa dan anak-anak dibakar di rumah mereka sendiri (*De Gooi - en Eenlander*, 7 Agustus 1947).

Sepanjang tahun 1948 tidak ditemukan adanya berita mengenai kekerasan terhadap golongan Tionghoa secara spesifik, namun keadaan kota pada masa ini juga tidak sepenuhnya aman. Baru pada pertengahan akhir tahun 1949 dilaporkan kembali terjadinya beberapa kekerasan yang menimpa orang Tionghoa Malang. Teror pertama dilaporkan terjadi pada tanggal 12 Agustus bahwa seseorang tak dikenal melempar granat tangan ke rumah seorang Tionghoa di daerah Kotalama. Untungnya tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut karena granat tersebut tidak meledak (*De Vrije Pers*, 15 Agustus 1949).

Selanjutnya, pada bulan Desember 1949 dilaporkan terjadi sejumlah aksi perampasan *vrachauto* dan kendaraan lain di tengah jalan dan beberapa aksi penggedoran di Malang. Perampasan tersebut salah satunya menimpa seorang gadis Tionghoa bernama Tjan Sien Nio pada 15 Desember. Pada saat itu ia sedang naik sepeda di Jl. Tongan dan dihadang orang tidak terkenal. Sepeda gadis tersebut dirampas dan gadis itu ditembak hingga meninggal (*Sedar*, 22 Desember 1949).

Selain itu, di Kampung Watugong, tiga kilometer di bagian barat Malang ditemukan sebuah kuburan massal. Setidaknya ada dua belas kuburan digali yang diperkirakan berisi korban-korban dari aksi kekerasan yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Penggalan tersebut, dilakukan di hadapan para pengamat dari UNCI (*United Nation Commission for Indonesia*), Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa korban berhasil diidentifikasi, meskipun mayat-mayat tersebut ditemukan dalam keadaan yang mengerikan.



Figur 2. Peta Gemeente Malang tahun 1914 yang digunakan untuk menunjukkan pembagian wilayah demarkasi. Lingkaran merah merupakan wilayah kekuasaan Belanda di Malang. Sumber: Handinoto (1996:21)

Kuburan massal ini merupakan kuburan yang dibuat dengan sengaja untuk membuang mayat-mayat yang dibunuh selama periode kekacauan tersebut.

Tentara Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua pada tanggal 18-19 Desember 1948. Pada masa itu, wilayah Jawa Timur terbelah menjadi dua, separuh wilayah Jawa Timur berhasil diduduki Belanda dan sisanya berada di bawah kekuasaan Republik. Garis pemisah kedua wilayah tersebut (demarkasi) membujur dari bagian barat Gresik menuju ke selatan menuju puncak gunung Arjuno, ke selatan menuju pinggir timur Pujon sampai puncak Gunung Kawi, ke timur melalui sebelah selatan Gunung Katu, Pakisaji, Kreet/Bululawang, Tajinan, Ngembal, Patokpicis, sampai puncak Semeru, dan ke selatan sepanjang Kali Glidig (batas Kabupaten Malang dan kabupaten Lumajang) sampai ke pantai Samudera Hindia (Sapto, 2012: 157).

Di Kota Malang sendiri juga terjadi pembagian kekuasaan antara Belanda dan Republik. Perampokan dan perusakan terhadap harta benda penduduk seringkali terjadi di daerah-daerah pinggiran yang dekat dengan kedudukan pos Belanda. Daerah-daerah tersebut menjadi target aksi kriminal karena tidak mendapatkan pengawasan dan penjagaan. Daerah Kota Lama,



Figur 3. Kondisi kuburan di Lawang yang dirusak oleh gerombolan Djamino dan Djaliteng, foto diambil sekitar Agustus 1947. Sumber: <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie>, (diakses pada 10 April 2022 pukul 20.55)

Pecinan dan sekitarnya merupakan daerah pinggiran yang berdekatan langsung dengan kekuatan Belanda, dan sering menjadi target aksi kriminal (Chambali, wawancara, 2017)

Pelaku dan Korban Kekerasan

Kwee Thiam Tjing dalam bukunya banyak menyebut gerombolan Djamino dan Djaliteng sebagai pelaku utama aksi perampokan yang disertai kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa. Selain merampok rumah-rumah mereka yang masih hidup, gerombolan Djamino dan Djaliteng juga merampok rumah-rumah mereka yang telah mati. Sebuah kuburan Belanda di daerah Klodjen Lor dilaporkan telah dirusak dan diobrak-abrik oleh golongan Djamino dan Djaliteng. Segala macam benda yang biasanya ada di kuburan Belanda seperti tegel, *payon zink*, *ruji*, karangan bunga hingga boneka bidadari habis dibawa oleh gerombolan Djamino dan Djaliteng tersebut (Berdoeri, 2004: 204).

Cerita mengenai keberadaan Djamino dan Djaliteng di kalangan penduduk Malang juga cukup terkenal. Menurut Mbah Fatimah, yang berumur sekitar 80 tahun ketika diwawancarai, Djaliteng sebenarnya memiliki arti sesuatu yang berwarna hitam dan juga merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa. Sementara itu, Djamino merupakan sosok hantu yang ditakuti dan sering diceritakan oleh kedua orangtuanya semasa ia kecil (Fatimah, wawancara, 2017). Dari penuturan Fatimah dapat disimpulkan bahwa Djamino dan Djaliteng merupakan sebutan terhadap suatu kelompok tertentu yang tidak dikenal dengan jelas dan diasosiasikan dengan segala

sesuatu yang menakutkan.

Melihat banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan gerombolan Djamino dan Djaliteng, Kwee Thiam Tjhing menyimpulkan bahwa kedua gerombolan tersebut besar kemungkinan adalah para tunawisma atau apa yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai orang *mbambong* (Berdoeri, 2004: 196). Dalam beberapa pernyataannya, Kwee memang sering menyebut gerombolan ini berisi orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan hidup berpindah-pindah tempat.

Sementara itu, F. X. Harsono berpendapat bahwa di beberapa tempat kelompok milisi merupakan dalang dari aksi-aksi kekerasan terhadap komunitas Tionghoa. Mereka umumnya diidentifikasi sebagai tentara gadungan, laskar rakyat, laskar Hizbullah, juga preman atau kriminal. Walaupun demikian, masih belum pasti siapakah pelaku sebenarnya karena adanya bias antara organisasi atau badan perjuangan dan golongan kriminal. Laskar-laskar rakyat ini memang membantu perjuangan dalam melawan Belanda walaupun strategi dan tujuannya seringkali berseberangan dengan tentara Republik.

Surat kabar *Algemeen Indisch Dagblad* menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan tiga puluh orang Tionghoa di daerah Mergosono adalah Lasmoe. Menurut penuturan penduduk, Lasmoe adalah sebuah kelompok kriminal yang memanfaatkan situasi kekacauan untuk kepentingan golongannya sendiri, sebelum akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman (*Algemeen Indisch Dagblad*, 20 Agustus 1947). Berbeda dengan surat kabar di atas, Chung Hua Tsung Hui dalam laporannya menyebutkan bahwa pelaku utama dalam peristiwa pembantaian di Mergosono adalah kelompok tentara revolusioner yang dipimpin oleh Prawiroe, dan Mergosono adalah basis pertahanan mereka. Kelompok inilah yang membawa para korban menuju lokasi tersebut (Hui, 1947: 15).

Dari sisi korban, Menurut Remco Raben, sejumlah besar orang Tionghoa yang menjadi target kekerasan pada masa revolusi bukan merupakan bagian dari korban peperangan antara Indonesia dan Belanda, melainkan korban dari aksi terorisme dalam skala kecil dan pembunuhan massal (Remco Raben, 2006). Demikian pula halnya dengan kekerasan anti-Tionghoa di Malang yang menasar kepada kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan perlindungan dari pihak Republik maupun pihak Belanda. Sebaliknya, orang-orang Tionghoa yang mengungsi dari Surabaya ke Malang pada saat pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tidak menjadi korban karena mereka berada di bawah tanggung jawab Palang Merah Tionghoa.

Mereka yang menjadi korban penjarahan properti umumnya adalah para pedagang Tionghoa yang memiliki toko dan rumah di daerah Kajoetangan. Sementara itu, mereka yang dilaporkan mengalami teror pembakaran dengan dinamit adalah mereka yang rumahnya terletak di Jalan



Figur 4.
Penguburan
massal korban
kekerasan
oleh Chung
Hua Tsung
Hui. Sumber:
<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/>
(diakses pada
10 April 2022
pukul 21.05
WIB)

Bromo, Ardjuno, Bandhuisweg, di Ijen termasuk rumah tuan Tjon Sie Lin, dan beberapa rumah di Jalan Kawi. Perusakan juga menimpa kantor Chung Hwa Tsung Hui, pabrik minyak, gudang beras dan dua buah pabrik es. Sebaris rumah di Jl. Klenteng, 10 rumah di Kebalen Wetan dan 10 rumah antik di Kotalama, termasuk perusahaan milik Mr. Lim King Tjoe juga dibakar habis. Sebuah rumah megah di Malang yang dimiliki oleh Alm. Mr. The Bo Djwan juga dihancurkan (Hui, 1947: 15).

Selain itu, menurut informasi Chung Hua Tsung Hui Malang sekitar dua puluh orang Tionghoa di Kutobedah dan Buring juga menjadi korban pembantaian. Korban yang teridentifikasi adalah Mr. Yap Tik Poen dan keluarga. Disamping itu, juga tercatat Lim Kway Tjing dan Tho Koen Tiong yang hendak pergi dari Bedda ke Lawang untuk mengamankan harta bendanya juga ditembak dan dibakar hidup-hidup (Hui, 1947: 15).

Kesimpulan

Kekerasan yang menimpa golongan Tionghoa pada masa revolusi umumnya dianggap sebagai kulminasi kemarahan rakyat Indonesia atas ketidakadilan yang mereka alami selama masa kolonial. Sementara itu, komunitas Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan tersebut, karena mereka dipandang sebagai kelompok yang mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik karena posisinya ditempatkan sebagai minoritas perantara. Dalam

posisinya tersebut, orang-orang Tionghoa difungsikan sebagai penghubung antara kelompok orang Belanda dan penduduk pribumi. Sebagai contoh nyata adalah mata pencaharian mereka sebagai pedagang, pemilik toko atau pembunga uang yang menghubungkan kedua kelompok tersebut di bidang ekonomi. Mereka akan memberikan pelayanan baik kepada kelompok yang menduduki strata sosial lebih tinggi dibanding mereka, yakni golongan Eropa, maupun kepada kelompok dari strata yang lebih rendah dibanding mereka, yakni penduduk pribumi. Karena posisi mereka sebagai perantara tersebut, orang Tionghoa seringkali dijadikan kambing hitam oleh Pemerintah Kolonial dan sekaligus menjadi sasaran stigma yang kurang baik di mata golongan pribumi.

Kondisi tersebut jelas terlihat di kota Malang. Bahkan stigma buruk yang melekat pada kelompok Tionghoa tersebut kemudian diperburuk dengan sikap dan tindakan beberapa orang Tionghoa pada masa penjajahan Jepang yang banyak merugikan penduduk pribumi seperti melakukan penimbunan barang hingga penguasaan atas rumah-rumah milik orang Eropa. Walaupun tidak semua Tionghoa melakukan hal tersebut, namun secara tidak langsung semuanya itu berperan dalam membentuk stigma di kalangan penduduk Malang bahwa orang-orang Tionghoa tidak berada dalam pihak yang sama dengan mereka.

Pada masa revolusi, ketika terjadi kegentingan di Malang dan aparat pemerintah Republik maupun Belanda masih lemah, stigma buruk dan kebencian terhadap orang Tionghoa meledak menjadi aksi kekerasan. Hal-hal sederhana seperti kepemilikan uang NICA sudah cukup untuk menjadi bukti untuk menuduh orang-orang Tionghoa tidak mendukung perjuangan revolusioner. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok laskar perjuangan untuk ‘mengadili’ orang-orang Tionghoa dengan cara mereka sendiri. Salah satu contoh paling ekstrem adalah pembantaian 30 puluh orang Tionghoa, laki-laki dan perempuan di daerah Mergosono. Selain itu, aksi-aksi kekerasan bernuansa kriminal juga marak terjadi - mulai dari pencurian, perampasan, penggedoran, penjarahan, dan lain sebagainya, yang menasar orang-orang Tionghoa. Semua rangkaian peristiwa kekerasan tersebut, membuktikan kerentanan posisi orang-orang Tionghoa di tengah perubahan politik dan transisi kekuasaan; sebuah situasi yang kemudian berulang di episode-episode berikutnya dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.

Referensi

Arsip

ANRI, Arsip Kementrian Dalam Negeri 1945 – 1949, No. 37.

ANRI, Arsip Kementerian Dalam Negeri, 1945 – 1949, No. 137.

ANRI, Arsip Kepolisian Negara 1945 – 1947, tanggal 22 Maret 1947, No. 331.

Arsip Dinas Sejarah Militer TNI AD, Arsip Intelijen Jawa Timur No. 345.

Artikel dan Buku

- Ari Sapto (2012). Kerjasama dan Persaingan Elite di Jawa Timur pada Masa Krisis Pemerintahan Republik Indonesia, 1948 – 1950. *Disertasi*. Program Studi Humaniora. Universitas Gadjah Mada.
- Benny G. Setiono (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia.
- Bussemaker, H. Th. (2005). *Bersiap! Opstand in het Paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945 – 1946*. Utrecht: Walburg Pers.
- Colombijn, Freek & Lindblad, Thomas (2002). *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Leiden: KITLV.
- Coppel, Charles A. (1983). *Indonesian Chinese in Crisis*. Oxford: Oxford University Press.
- Departement van Economische Zaken (1935). *Volkstelling 1930 Deel VII: Chinezen en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch Indie*. Batavia Centrum: Landsdrukkerij.
- Dukut Imam Widodo (2006). *Malang Tempoe Doeloe*. Malang: Banyumedia Pulisher.
- F. X. Harsono (30 September 2015). Pembunuhan Massal Orang Tionghoa di Pulau Jawa 1947 – 1949. <http://toelip.wixsite.com/toelip/single-post/2015/09/30/Pembunuhan-Massal-Orang-Tionghoa-di-Pulau-Jawa-19471949>.
- Handinoto (1996). “Perkembangan Kota Malang pada Jaman Kolonial 1914 – 1940”, *Dimensi* 22.
- Handinoto (2015). *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya: Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad X*. Yogyakarta: Ombak.
- Heidhues, Mary Somers (2012). “Anti-Chinese Violence in Java during the Indonesian Revolution, 1945-49”, *Journal of Genocide Research* 14, 3-4: 381-401.
- Hui, Chung Hua Tsung (1947). *Memorandum, Outlining Acts of Violence and Humanity Perpetrated by Indonesia Bands on Innocent Chinese Before and After The Dutch Police Action Was Enforced on July 21, 1947*. Batavia.
- Kahin, Audrey (1985). *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution*. Hawaii: University of Honolulu Press.
- Melani Budianta (2012). “Cultural Expression of the Chinese”, dalam Lindsay, J. & Liem, M. (Eds.), *Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950 – 1965*. Leiden: KITLV Press.
- Ravando Lie (2014). Now is the Time to Kill All The Chinese! Social Revolution and the Massacre of Chinese in Tangerang, 1945 – 1946. *MA Thesis*. Colonial and Global History, Leiden University, Leiden.
- Reid, Anthony (1981). “Revolusi Sosial: Revolusi Nasional”, *Prisma*, No. 8.
- Reza Hudiyanto (2007). “Pahlawan yang Terlupakan: Pers Melayu, Etnik Tionghoa, dan Nasionalisme di Kota Malang, 1920 – 1950,” *Humaniora* 19, 3: 215-223.
- Sartono Kartodirdjo (1981). “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural,” *Prisma* 8.
- Siong, Han Bing (2001). “The Indonesian Need of Arms After Proclamation”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 157, 4: 799-830.
- Sjafari, Irvan (1992). Peranan PMI di Keresidenan Malang pada Masa Revolusi 1945-1949. *Skripsi*. FSUI, Universitas Indonesia.
- Tjamboek Berdoeri (2004). *Indonesia dalem Api dan Bara*. Jakarta: Elkasa.
- Wild, Colin & Carey, Peter (Eds.) (1986). *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*.

Jakarta: Gramedia.

Surat Kabar dan Majalah

Algemeen Indisch Dagblad, 20 Agustus 1947.

De Gooi en Eenlander, 7 Agustus 1947.

De Vrije Pers, 15 Agustus 1949.

Sedar, 22 Desember 1949.

Sumber-sumber Internet

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/aef4cf02-d0b4-102d-bcf8-003048976d84?searchKey=5e4eac8902658a4d5cff9aadfc3785a6> diakses pada 10 April 2022 pukul 20.55

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/1a0b0326-fda3-60d3-4692-2906f686c5c0?searchKey=5e4eac8902658a4d5cff9aadfc3785a6> diakses pada 10 April 2022 pukul 20.58 WIB

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/19a87d12-62be-dfa7-de6d-f3611c079bc1?searchKey=5e4eac8902658a4d5cff9aadfc3785a6> diakses pada 10 April 2022 pukul 21.05 WIB

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/5fa42259-ee89-5991-49c1-7b738aca50e1?searchKey=5e4eac8902658a4d5cff9aadfc3785a6> diakses pada 10 April 2022 pukul 21.23 WIB

Wawancara Lisan

Wawancara dengan Bp. Anton Triyono (Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang) di Malang pada 8 Mei 2017 pukul 10.50.

Wawancara dengan pak Chambali Soewito atau Lie Giok Sing (Pengurus Yayasan Kematian Panca Budhi) pada 9 Mei 2017 pukul 09.45 WIB

Wawancara dengan Mbah Fatimah (usia 80 tahun) 13 Mei 2017 pukul 10.31 WIB